

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh :**

**NAMA : DODI BUANA SAPUTR**

**NPM : 1574201250**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG  
KUNING PEKANBARU  
2019**

## A B S T R A K

DODI BUANA SAPUTRA (NPM:1574201250) dengan judul skripsi PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU di bawah bimbingan Bapak Dr.H.Iriansyah,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr.Fahmi, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakaukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Untuk mengetahui hambatan terhadap penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru,tidak sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil.Hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam memutuskan perkara menemukan kesulitan yaitu kurang cermatnya jaksa penuntut umum dala menerapkan pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa,serta kurangnya saksi dalam mengetahui kejadian yang dilakukan oleh si terdakwa dan kurangnya alat bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum.Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru adalah dengan pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa,serta proses dan pengelolaan dana desa dirubah sistimnya menjadi sederhana dan tidak tumpah tindih.

